

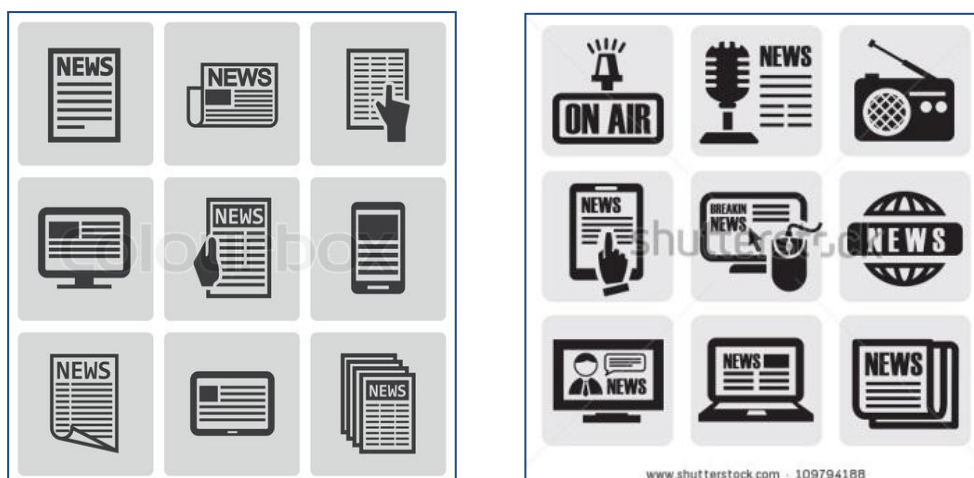


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Politik

Kamis, 28 Agustus 2014



**Pusat Data Informasi dan Rencana Pembangunan Nasional
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. TRANSISI BERJALAN MULUS (*Media Cetak Bisnis Indonesia*)

Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

NAVIGASI
BISNIS
TERPERCAYA **Kamis, 28 Agustus 2014**
Halaman 1, Kolom 2-4

PERTEMUAN SBY-JOKOWI

Transisi Berjalan Mulus



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menyambut kedatangan Presiden terpilih, Joko Widodo di Nusa Dua Bali, Rabu malam (27/8).

JAKARTA—Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih Joko Widodo membuka jalan bagi tim transisi untuk bekerja dan menjadi awal komunikasi resmi antara kedua pihak hingga Jokowi resmi dilantik.

Siti Mita Sari & Hartono A. Wicaksono
mekatransisi.com

Tim transisi berbulan-bulan telah yang akan membahas lebih lanjut masalah teknis kebijakan dengan kementerian dan lembaga negara dalam pemerintahan Jokowi.

Dalam jumpa pers usai pertemuan itu, Yudhoyono mengatakan pembicaraan dengan Joko Widodo lebih banyak mengenai kebijakan dan program pemerintah, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. "Bersama RAPAN 2015 dan APNPN 2014," ungkapnya. Rabu (27/8) malam.

Sementara itu, Jokowi mengatakan pertemuan itu tidak membahas kebijakan secara detail. "Pembicaraannya tidak detail, nanti teknis dan detailnya dibahas bersama tim transisi," tuturnya.

Menurut Jokowi, pertemuan ini menjadi awal kerja dari pemerintahan baru dan diharapkan menjadi titik awal yang dilanjutkan pemerintahan berikutnya.

Selanjutnya, pemerintahan terpilih akan segera melakukan pemecatan terkait kebijakan-kebijakan baru sehingga akan terjadi kesinambungan pemerintahan.

Pertemuan sorenya dua jam yang dimulai sejak pukul 21.00 WTA ini diadakan di tengah suasana suasana pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Beck SBY maupun Jokowi sebelumnya mengisyaratkan keinginan agar kebijakan soal BBM dilakukan oleh pemerintahan masing-masing pihak. Namun, kedua pihak tidak menyinggung masalah BBM sesuai pertemuan digelar.

Faktanya, pada Rabu (27/8) siang, Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat menunda pembahasan RAPAN 2015 hingga Senin (1/9) dengan pertimbangan menunggu hasil pertemuan Presiden Yudhoyono dan calon presiden terpilih Joko Widodo yang digelar di Bali pada hari yang sama.

Menurut Ketua Bappenas Ahmad Noor Supri (Praksi Partai Golkar), pembahasan RAPAN 2015 perlu memasukkan ide atau kebijakan strategis pemerintahan baru pascapertemuan Joko Widodo dan Presiden Yudhoyono.

Pemerintah Yudhoyono, katanya, tidak boleh menyampaikan usulan yang berbeda dari Nota Keuangan dalam pembahasan. Di sisi lain, memastikan visi dan misi Joko Widodo-Jusuf Kalla ke dalam RAPAN 2015 lebih penting karena tahun anggaran 2015 akan dijalankan oleh pemerintahan baru.

Menteri Keuangan M. Chatib Basri semula terhalang soal DPR untuk menunda rapat hingga Senin pekan depan.

"Kami sangat terbuka untuk mendiskusikan isu (subsidi) BBM sehingga APNPN yang kita perolehi, bisa saya selidit sebagai APNPN kita bersama, bukan APNPN pemerintahan baru yang dimiliki pemerintahan lama," katanya.

Badan Anggaran DPR dan pemerintah sepakat menunda pembahasan RAPAN 2015 hingga Senin (1/9).

Pertamina mendapatkan jaminan bahwa overkuota akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Terkait kuota BBM bersubsidi, Chatib tetap yakin akan 45 juta kiloliter untuk tahun ini tidak akan jelek, meski pemerintah memanduk normalisasi penyediaan BBM subsidi untuk mengatasi kelangkaan.

Namun demikian, Menkeu menyoal apakah mekanisme pengantaraan kuota kepada perusahaan pelat merah itu. "Pertamina harus punya strategi bagaimana normalisasi dilakukan," katanya.

Dalam UU No 12/2014 yang mengatur Perubahan APNPN 2014, kuota BBM subsidi 45 juta kiloliter sehingga pemerintah tidak dapat lagi meningkatkan jumlah volume beyond DPR. Ketika konsumsi BBM menunjukkan gejala kuota bakal terlampaui.

REVISI APNPN 2014
Meski tak berformalitas saat ditanya soal adanya jaminan pemerintah jika terjadi overkuota akibat normalisasi penyediaan BBM bersubsidi.

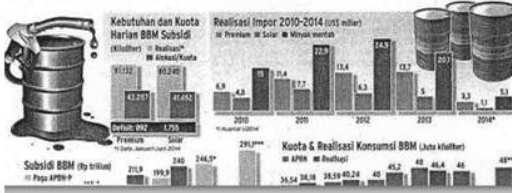
Direktur Penasaram dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hartung Budya sebelumnya mengatakan pemerintah telah mendapatkan jaminan dari pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung bahwa overkuota akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dengan adanya jaminan itu, Pertamina berani memantapkan untuk memnormalisasi penyediaan BBM bersubsidi mulai Selasa malam (26/8) setelah beberapa pekan dibatasi.

Hartung memperkirakan potensi overkuota bisa mencapai 1,35 juta k sehingga total konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir tahun berkisar 47,35 juta k.

Sementara itu, Menteri ESDM Jer Wacik mengatakan pemerintah akan mencari celah untuk merevisi UU APNPN 2014 jika realisasi penyediaan BBM bersubsidi melebihi batas kuota yang ditetapkan. "Pelibat revisi UU APNPN 2014 sudah terlewat," katanya.

Margri, M. Taufiq Rahman & Fauzi Muzli



Pertemuan presiden SBY dengan presiden terpilih membuka jalan bagi tim transisi untuk bekerja dan menjadi awal komunikasi resmi antara kedua pihak hingga presiden terpilih dilantik

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintah #RKP(RencanaKerjaPemerintah)